



BEYOND POLICY IMPLEMENTATION: STRENGTHENING CAPACITY BUILDING FOR VILLAGE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) IMPLEMENTATION IN CIRARAB VILLAGE

BEYOND POLICY IMPLEMENTATION: PENGUATAN CAPACITY BUILDING DALAM IMPLEMENTASI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA DI DESA CIRARAB

Nural Achmad Raainaa ¹⁾; Kiky Andriyani Dwi Pangestuti ²⁾; Farda Aisyah Devintasari ³⁾; Youngki Alfian Dinata ⁴⁾; Gabiela Gumilang ⁵⁾; Sylvia Rijha Putri ⁶⁾; Yoga Pratama ⁷⁾; Muhammad Barra Marelangga⁸⁾;

¹⁾ nuralachsby@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN*

²⁾ andriyanikdp@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ sydvntsr@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁴⁾ yalfiandinata@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁵⁾ bellagumilang26@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁶⁾ sylviarijhaputri@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁷⁾ pyoga8784@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

⁸⁾ jackier.got8@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The implementation of the Village Sustainable Development Goals (SDGs) is part of the government's efforts to realize sustainable village development through data-based planning and community participation. However, the implementation of the Village SDGs in various regions still faces various obstacles, including in Cirarab Village, Legok District, Tangerang Regency. This study aims to describe the implementation of the Village SDGs, identify the obstacles faced, and analyze efforts to improve the implementation of the Village SDGs in Cirarab Village. The study used a qualitative descriptive approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, documentation, and focus group discussions (FGDs) with informants selected by purposive sampling, including the village head, village officials, PKK cadres, and other related parties. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of the Village SDGs in Cirarab Village has not been running optimally. The main obstacles include limited outreach regarding the Village SDGs, low human resource capacity in managing SDG applications, the lack of knowledge transfer after the change of SDGs administrator, and suboptimal institutional structures and data management systems. Based on analysis using George C. Edward III's policy implementation theory, the success of Village SDGs implementation is influenced by four factors: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. Outreach and mentoring activities have increased village officials' understanding of the Village SDGs and resulted in recommendations for strengthening the SDGs Working Group (Pokja SDGs) institution, digitizing data management, increasing apparatus capacity, and providing ongoing mentoring. These efforts are expected to increase the effectiveness of Village SDGs implementation as a basis for participatory, data-driven, and sustainable village development.

Keywords: Community participation; Data-based planning; Policy implementation; Village development; Village SDGs

Abstrak

Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan melalui perencanaan berbasis data dan partisipasi masyarakat. Namun, pelaksanaan SDGs Desa di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala, termasuk di Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi SDGs Desa, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya peningkatan implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan focus group discussion (FGD) dengan informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, perangkat desa, kader PKK, dan pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi



data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab belum berjalan secara optimal. Kendala utama meliputi terbatasnya sosialisasi mengenai SDGs Desa, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aplikasi SDGs, tidak adanya transfer of knowledge setelah pergantian admin SDGs, serta belum optimalnya struktur kelembagaan dan sistem pengelolaan data. Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi SDGs Desa dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai SDGs Desa serta menghasilkan rekomendasi berupa penguatan kelembagaan Pokja SDGs, digitalisasi pengelolaan data, peningkatan kapasitas aparatur, dan pendampingan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi SDGs Desa sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan desa yang partisipatif, berbasis data, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan; Partisipasi masyarakat; Perencanaan berbasis data; Pembangunan desa; SDGs Desa

PENDAHULUAN

Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh, baik dalam aspek ekonomi, sosial, lingkungan, maupun kelembagaan. Menurut *Todaro & Smith (2020)*, pembangunan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta terciptanya lingkungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pembangunan tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Perkembangan paradigma pembangunan melahirkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. *Sustainable Development Goals* (SDGs), merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan internasional untuk mencapai manfaat bagi manusia dan planet hingga tahun 2030 (*Jayanthi et al., 2024*). Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa merupakan agenda pembangunan berkelanjutan yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai pedoman pembangunan desa yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, penguatan kelembagaan, serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif (*Nurhayati et al., 2025*). SDGs Desa terdiri atas 18 tujuan yang menjadi acuan pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan (*Usadi, 2021*). Implementasi SDGs Desa tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengukuran capaian pembangunan, tetapi juga menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan desa, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (*Setiya et al., 2022*).

Keberhasilan implementasi SDGs Desa sangat dipengaruhi oleh ketersediaan data yang akurat, kapasitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan desa, serta keterlibatan masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai desa masih menghadapi tantangan dalam melakukan pendataan, pemutakhiran data, hingga penginputan informasi ke dalam sistem SDGs Desa. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pengukuran pembangunan belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil desa sehingga dapat memengaruhi ketepatan penyusunan kebijakan pembangunan (*Lisa et al., 2025*).



Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pembangunan yang cukup baik. Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Desa Cirarab berstatus sebagai Desa Maju dengan berbagai potensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat dikembangkan. Namun demikian, capaian SDGs Desa menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan data SDGs Desa tahun 2024, skor SDGs Desa Cirarab masih berada pada angka 40,22. Beberapa tujuan telah mencapai capaian optimal, tetapi masih terdapat sejumlah indikator yang bernilai sangat rendah bahkan nol, terutama pada aspek pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan inovasi desa, konsumsi dan produksi berkelanjutan, perubahan iklim, serta pelestarian lingkungan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara potensi pembangunan desa dengan implementasi program SDGs Desa.

Hasil identifikasi lapangan menunjukkan bahwa rendahnya implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab tidak hanya disebabkan oleh capaian indikator pembangunan, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek tata kelola. Permasalahan yang ditemukan antara lain belum optimalnya pemahaman perangkat desa mengenai SDGs Desa, belum adanya proses transfer pengetahuan setelah pergantian admin SDGs, keterbatasan kemampuan teknis dalam pengoperasian aplikasi SDGs Desa, minimnya pendampingan dari instansi terkait, belum optimalnya pelibatan kader PKK dalam proses pendataan, serta belum terselenggaranya pemutakhiran data secara menyeluruh dari tingkat individu, keluarga, RT, hingga desa. Berbagai kendala tersebut berdampak pada rendahnya kualitas data yang menjadi dasar perencanaan pembangunan desa.

Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan implementasi SDGs Desa melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, kader PKK, dan masyarakat. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi permasalahan implementasi SDGs, sosialisasi dan workshop SDGs Desa, penyusunan buku panduan dan media edukasi, pendampingan proses pendataan, penyusunan checklist kebutuhan data SDGs, serta pemberian rekomendasi perbaikan tata kelola implementasi SDGs Desa. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur desa sekaligus memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya SDGs Desa sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian mengenai implementasi SDGs Desa lebih banyak menitikberatkan pada pengukuran capaian indikator SDGs, evaluasi program pembangunan desa, atau analisis kebijakan secara umum. Penelitian terdahulu belum banyak mengaitkan implementasi SDGs Desa dengan teori pemberdayaan masyarakat sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat memengaruhi keberhasilan implementasi. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dan teori pemberdayaan (Ife, Chambers, Freire, Suharto, dan Kartasasmita) sehingga implementasi SDGs Desa dipahami tidak hanya sebagai proses administratif, tetapi juga sebagai proses penguatan kapasitas (*capacity building*) dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini memandang implementasi SDGs Desa bukan sekadar implementasi kebijakan, tetapi sebagai proses pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas kelembagaan desa. Pendekatan ini memperluas perspektif implementasi kebijakan yang selama ini lebih banyak berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan mendeskripsikan implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi SDGs Desa. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah desa maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat tata kelola pembangunan desa berbasis



SDGs sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat berlangsung secara lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk menggambarkan implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Cirarab, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Sasaran penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, meliputi Kepala Desa, perangkat desa, kader PKK, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan SDGs Desa. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 2024 bersamaan dengan kegiatan Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) PKN STAN melalui koordinasi, sosialisasi, *workshop*, dan pendampingan implementasi SDGs Desa.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan diskusi kelompok (*focus group discussion/FGD*). Instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, serta checklist indikator SDGs Desa yang disusun berdasarkan pedoman SDGs Desa dari Kementerian Desa. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber dan teknik sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SDGs merupakan suatu program dunia jangka panjang untuk mengoptimalkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh tiap negara. Sebagai bagian dari masyarakat dunia, perlu kiranya memandang negara lain termasuk PBB juga sebagai “masyarakat negara” (Irhamisyah, 2019). Implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa di Desa Cirarab menunjukkan bahwa pembangunan desa berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan tingkat partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil kegiatan pendampingan, diketahui bahwa implementasi SDGs Desa belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang ditemukan meliputi rendahnya pemahaman perangkat desa mengenai SDGs Desa, belum adanya transfer pengetahuan dari admin sebelumnya, rendahnya kemampuan teknis dalam penginputan data, minimnya sosialisasi kepada kader PKK, serta belum optimalnya proses pemutakhiran data SDGs. Akibat kondisi tersebut, beberapa indikator SDGs Desa masih memperoleh nilai nol, bukan semata-mata karena program pembangunan belum dilaksanakan, tetapi karena data pendukung belum terdokumentasi dan belum diinput ke dalam sistem informasi SDGs Desa.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi SDGs Desa di Cirarab lebih mengarah pada persoalan *capacity building* dibandingkan keterbatasan sumber daya pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Grindle (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, kompetensi sumber daya manusia, serta dukungan lingkungan implementasi. Meskipun kebijakan SDGs Desa telah ditetapkan melalui berbagai regulasi pemerintah, implementasi di tingkat desa akan sulit berjalan apabila pelaksana kebijakan belum memiliki kemampuan teknis maupun pemahaman konseptual mengenai tujuan program tersebut.

Permasalahan tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Pemberdayaan Ife (2022) yang menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat agar mampu mengontrol sumber daya, menentukan pilihan, serta mengambil keputusan yang memengaruhi kehidupannya. Menurut Ife, pemberdayaan bukan hanya memberikan bantuan atau fasilitas kepada masyarakat, tetapi menciptakan kondisi agar



masyarakat memperoleh akses terhadap informasi, pendidikan, keterampilan, organisasi, serta kesempatan berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan SDGs Desa tidak cukup diukur dari jumlah program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dan aparatur desa memiliki kemampuan untuk mengelola pembangunan secara mandiri.

Dalam konteks Desa Cirarab, kegiatan sosialisasi, workshop SDGs Desa, penyusunan buku panduan, penyebaran poster edukasi, hingga penyusunan *checklist* pendataan SDGs merupakan bentuk pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas aparatur desa dan kader PKK. Program-program tersebut tidak hanya memberikan informasi mengenai konsep SDGs Desa, tetapi juga meningkatkan keterampilan teknis perangkat desa dalam melakukan pendataan, memahami indikator SDGs, serta memanfaatkan hasil pendataan sebagai dasar penyusunan RPJMDes dan RKPDes. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep *capacity building* yang dikemukakan Ife, dimana peningkatan pengetahuan menjadi langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang berdaya dan mampu mengelola pembangunan secara berkelanjutan.

Selain Ife, Chambers (2021) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses "*putting the last first*", yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pembangunan, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Menurut Chambers, pembangunan akan berhasil apabila masyarakat dilibatkan dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan partisipatif ini terlihat pada implementasi SDGs Desa di Cirarab melalui pelibatan kader PKK sebagai enumerator dalam pendataan tingkat keluarga, RT, dan desa. Pelibatan kader PKK menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mendekatkan proses pendataan kepada masyarakat karena kader merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial di lingkungannya. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan kader PKK belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang efektif. Berdasarkan hasil identifikasi masalah, kader PKK belum pernah memperoleh sosialisasi mengenai tujuan maupun manfaat SDGs Desa sehingga proses pendataan belum dilakukan secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui pelibatan fisik dalam kegiatan, tetapi harus disertai dengan peningkatan kapasitas agar masyarakat memahami makna dari aktivitas yang dilakukan. Dengan kata lain, partisipasi yang berkualitas lahir dari proses pemberdayaan yang berkesinambungan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Freire (2023) melalui konsep *conscientization* (penyadaran kritis). Freire menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses membangun kesadaran masyarakat terhadap persoalan yang dihadapi sehingga mereka mampu bertindak untuk mengubah kondisi tersebut. Dalam implementasi SDGs Desa, sosialisasi yang dilakukan kepada perangkat desa dan kader PKK tidak hanya bertujuan meningkatkan pengetahuan mengenai indikator SDGs, tetapi juga membangun kesadaran bahwa data SDGs merupakan dasar utama penyusunan kebijakan pembangunan desa. Ketika masyarakat memahami hubungan antara pendataan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, maka mereka akan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pengumpulan maupun pemutakhiran data.

Lebih lanjut, Suharto (2022) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan dilakukan melalui serangkaian kegiatan pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan pengorganisasian masyarakat. Sebagai tujuan, pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mengakses sumber daya, berpartisipasi dalam pembangunan, serta memiliki kemandirian sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan konsep tersebut, kegiatan KKM di Desa Cirarab telah menjalankan fungsi pemberdayaan sebagai proses melalui



pelaksanaan workshop, pendampingan teknis, penyusunan buku panduan SDGs, penyebaran media edukasi, hingga pembentukan rekomendasi Pokja SDGs Desa.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa di Cirarab masih menghadapi persoalan kelembagaan. Tidak adanya transfer pengetahuan dari admin SDGs sebelumnya menyebabkan proses pemutakhiran data berhenti karena perangkat desa tidak mengetahui mekanisme penginputan maupun akses ke sistem informasi SDGs Desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan SDGs Desa masih bergantung pada individu tertentu (person dependent), bukan pada sistem organisasi yang kuat. Menurut Senge (1990) melalui konsep *learning organization*, organisasi yang efektif harus mampu menciptakan mekanisme pembelajaran berkelanjutan sehingga pengetahuan tidak hilang ketika terjadi pergantian personel. Oleh karena itu, rekomendasi pembentukan Pokja Relawan SDGs, digitalisasi arsip, penyusunan SOP, serta pembangunan sistem *knowledge management* menjadi strategi yang tepat untuk menciptakan kelembagaan desa yang adaptif dan berkelanjutan.

Implementasi SDGs Desa di Cirarab juga menunjukkan bahwa pemberdayaan tidak hanya menyentuh aspek administrasi pemerintahan, tetapi juga pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal tersebut tercermin dari keberadaan bank sampah yang telah dikelola masyarakat, pengembangan pertanian pekarangan desa, kegiatan pendidikan di PAUD, serta pendampingan UMKM. Bank sampah menjadi salah satu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat karena mampu mengubah sampah menjadi sumber pendapatan sekaligus mendukung tujuan SDGs mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan sarana, rendahnya pendapatan operasional, dan belum adanya regulasi desa yang memperkuat kelembagaan bank sampah.

Menurut Kartasasmita (2024), pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga strategi utama, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* berarti menciptakan iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang melalui penyediaan informasi dan kesempatan. *Empowering* dilakukan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan akses terhadap sumber daya. Sementara *protecting* merupakan upaya memberikan perlindungan melalui regulasi, kebijakan, maupun dukungan kelembagaan agar masyarakat mampu berkembang secara berkelanjutan. Ketiga strategi tersebut telah mulai diterapkan dalam implementasi SDGs Desa Cirarab melalui sosialisasi, pelatihan, penyusunan panduan, pembentukan Pokja SDGs, hingga rekomendasi penyusunan regulasi bagi bank sampah dan sistem pengelolaan data desa.

Secara keseluruhan, implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan kelembagaan, transfer pengetahuan, digitalisasi sistem informasi, serta partisipasi aktif masyarakat merupakan faktor utama dalam meningkatkan efektivitas implementasi SDGs Desa. Oleh karena itu, implementasi SDGs Desa sebaiknya tidak dipandang sebagai kegiatan administratif berupa pemenuhan indikator semata, melainkan sebagai proses pemberdayaan masyarakat yang bertujuan membangun desa yang mandiri, partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan pandangan Ife, Chambers, Freire, Suharto, dan Kartasasmita yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam setiap tahapan pembangunan sehingga keberhasilan SDGs Desa tidak hanya tercermin dari meningkatnya skor indikator, tetapi juga dari meningkatnya kapasitas masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan desa secara mandiri.

Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Desa Cirarab menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya mendukung pembangunan berkelanjutan melalui berbagai program yang berkaitan dengan ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan,



pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi tersebut belum berlangsung secara optimal. Hal ini terlihat dari capaian SDGs Desa tahun 2024 yang masih memperoleh skor 40,22 dengan beberapa indikator yang masih bernilai nol, seperti Desa Tanpa Kemiskinan, Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan, Desa Tanggap Perubahan Iklim, dan Desa Peduli Lingkungan Darat. Rendahnya capaian tersebut tidak sepenuhnya menunjukkan belum adanya program pembangunan, melainkan juga dipengaruhi oleh belum optimalnya proses pendataan, pemutakhiran, dan penginputan data ke dalam sistem SDGs Desa. Dengan demikian, implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab masih menghadapi kesenjangan antara pelaksanaan program di lapangan dengan sistem administrasi dan pelaporan yang menjadi dasar penilaian indikator SDGs.

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III (1980), kondisi tersebut dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Tangkilisan, 2022).

Faktor komunikasi menjadi kendala utama dalam implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab. Edward III menjelaskan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila informasi mengenai tujuan, prosedur, dan mekanisme kebijakan dapat dikomunikasikan secara jelas, konsisten, dan berkelanjutan kepada seluruh pelaksana (Widodo, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai SDGs Desa kepada perangkat desa maupun kader PKK masih sangat terbatas. Sebagian besar pelaksana hanya memahami SDGs sebagai kegiatan pendataan tanpa memahami bahwa data tersebut merupakan dasar penyusunan RPJMDes, RKPDes, hingga APBDes. Kondisi tersebut menyebabkan proses pendataan belum menjadi prioritas dalam tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi, workshop, penyusunan buku panduan, poster edukasi, serta pendampingan yang dilaksanakan selama kegiatan KKM menjadi strategi untuk memperbaiki aspek komunikasi sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki persepsi yang sama mengenai pentingnya implementasi SDGs Desa.

Faktor kedua adalah sumber daya (*resources*). Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya manusia, informasi, anggaran, kewenangan, dan sarana pendukung (Widodo, 2020). Di Desa Cirarab, kendala utama terletak pada kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola sistem SDGs Desa. Pergantian admin SDGs tanpa adanya proses transfer pengetahuan menyebabkan perangkat desa kehilangan kemampuan teknis untuk melakukan pemutakhiran data. Bahkan, informasi mengenai akun akses aplikasi SDGs Desa tidak lagi diketahui oleh perangkat desa yang bertugas saat ini. Selain itu, belum tersedianya sistem dokumentasi digital yang baik menyebabkan data yang telah dikumpulkan oleh kader PKK belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDGs Desa tidak cukup hanya didukung oleh alokasi dana desa, tetapi juga membutuhkan peningkatan kompetensi aparatur, sistem pengelolaan data yang terintegrasi, serta pendampingan teknis secara berkelanjutan.

Faktor ketiga adalah disposisi (*disposition*) atau komitmen pelaksana kebijakan. Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemauan, komitmen, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan (Widodo, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Cirarab memiliki komitmen yang baik untuk meningkatkan implementasi SDGs Desa. Hal ini dibuktikan dengan keterbukaan pemerintah desa menerima kegiatan pendampingan, melibatkan perangkat desa dan kader PKK dalam workshop, serta memberikan dukungan terhadap proses identifikasi permasalahan implementasi SDGs. Namun demikian, komitmen tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kapasitas teknis yang memadai sehingga implementasi kebijakan belum memberikan hasil yang



optimal. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan antara komitmen organisasi dan kemampuan operasional dalam melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya, faktor struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) juga menjadi aspek yang memengaruhi implementasi SDGs Desa. Menurut Edward III, struktur organisasi yang jelas serta prosedur operasional yang baku akan meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Widodo, 2020). Di Desa Cirarab belum terdapat mekanisme kelembagaan yang berjalan secara optimal dalam pengelolaan SDGs Desa. Belum adanya pembagian tugas yang jelas, belum optimalnya fungsi admin SDGs, serta belum tersusunnya sistem dokumentasi dan pengarsipan data menyebabkan proses implementasi bergantung pada individu tertentu. Ketika terjadi pergantian pegawai, proses implementasi SDGs mengalami hambatan karena tidak terdapat standar operasional maupun mekanisme alih pengetahuan. Oleh karena itu, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) SDGs Desa, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta digitalisasi arsip menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur birokrasi dalam implementasi SDGs Desa.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan selama KKM memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman perangkat desa dan kader PKK mengenai konsep SDGs Desa serta pentingnya pendataan sebagai dasar perencanaan pembangunan. Selain menghasilkan media edukasi berupa buku panduan, poster, materi presentasi, dan checklist pendataan, kegiatan ini juga menghasilkan rekomendasi strategis berupa penguatan kelembagaan Pokja SDGs, pengembangan sistem pengelolaan data berbasis digital, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDGs Desa memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah desa, masyarakat, perguruan tinggi, dan instansi pembina sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara partisipatif dan berbasis data (Aryani & Nurhazana, 2024).

Temuan penelitian ini memperkuat teori Edward III bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kecukupan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan (Winarno, 2022). Dengan terpenuhinya keempat faktor tersebut, implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab berpotensi menjadi lebih efektif sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

PENUTUP

Simpulan

Implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa di Desa Cirarab telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Rendahnya capaian beberapa indikator SDGs Desa lebih banyak dipengaruhi oleh kendala dalam aspek implementasi kebijakan, terutama terbatasnya komunikasi dan sosialisasi mengenai SDGs Desa, kurangnya kapasitas sumber daya manusia, belum optimalnya transfer pengetahuan antarperangkat desa, serta belum tertatanya struktur kelembagaan dan sistem pengelolaan data. Akibatnya, berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan belum terdokumentasikan secara baik dalam sistem SDGs Desa sehingga belum mampu meningkatkan capaian indikator pembangunan secara maksimal.

Berdasarkan analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi SDGs Desa di Desa Cirarab dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Kegiatan sosialisasi, workshop, pendampingan, serta penyusunan media edukasi yang dilaksanakan



selama kegiatan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman aparatur desa dan kader PKK mengenai implementasi SDGs Desa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan dan optimalisasi Pokja SDGs Desa, peningkatan kapasitas aparatur, digitalisasi sistem pengelolaan data, serta pendampingan yang berkelanjutan dari pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas implementasi SDGs Desa sehingga pembangunan desa dapat dilaksanakan secara lebih terarah, berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan.

Saran

Pemerintah Desa Cirarab perlu memperkuat implementasi SDGs Desa melalui peningkatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam pengelolaan data dan pemanfaatan aplikasi SDGs Desa. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan atau optimalisasi Kelompok Kerja (Pokja) SDGs Desa yang didukung dengan pembagian tugas yang jelas, penyusunan standar operasional prosedur (SOP), serta pengembangan sistem pengelolaan data berbasis digital agar proses pendataan, pemutakhiran, dan pelaporan SDGs Desa dapat berjalan secara berkelanjutan. Sosialisasi dan pendampingan kepada kader PKK serta masyarakat juga perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan partisipasi dalam penyediaan data dan pelaksanaan program pembangunan desa.

Bagi pemerintah daerah dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diperlukan penguatan pendampingan teknis, pelatihan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala agar implementasi SDGs Desa di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi SDGs Desa menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti metode campuran (mixed methods) atau analisis implementasi kebijakan dengan melibatkan lebih banyak desa sebagai objek penelitian. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi SDGs Desa serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, & Nurhazana. (2024). Analisis Strategi Pemerintah Desa Dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Di Kecamatan Rupa. *Jurnal IAKP*, 5(2), 136–150.
- Chambers, R. (2021). *Poverty and livelihoods: Whose reality counts?* Erlangga.
- Freire, P. (2023). *Education for critical consciousness*. Seabury Press.
- Grindle, M. S. (2022). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Ife, J. (2022). *Community development in an uncertain world: Vision, analysis and practice*. Cambridge University Press.
- Irhamyiah, F. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, 38.
- Jayanthi, N. K. E., Sudibia, I. K., Dewi, M. H. U., & Yasa, I. N. M. (2024). Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) Program in Indonesia: Literature Review Analysis. *IRJEMS International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(1), 497–502.
- Kartasasmita. (2024). *Pembangunan untuk rakyat: Memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. CIDES.
- Lisa, Permadi, A. S., & Arnisyah. (2025). Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) melalui Data SDGs Di Desa Tampelas Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan. *BITNET: Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 10(2), 37–47.



- Nurhayati, Lutfi, M. Y., Hidayatullah, N., & Wahyuningsih, M. (2025). *Desa Berkelanjutan Implementasi SDGs Dalam embangunan Desa di Indonesia*. Star Digital Publishing.
- Senge, P. M. (1990). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. Doubleday.
- Setiya, T., Raharjo, T., & Hadiwibowo, Y. (2022). Manajemen Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs Desa) Dimulai dari Penyusunan Peraturan Desa SDGs Desa. *CONSEN: Indonesian Journal of Community Services and Engagement*, 2(2), 54–66.
- Suharto, E. (2022). *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama.
- Tangkilisan. (2022). *Implementasi Kebijakan Publik*. Lukman Offset YPAPI.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.
- Usadi, D. (2021). SDG' Desa Dalam perencanaan Pengembangan Ekonomi Desa. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi Teknologi – SNITek*, 94–96.
- Widodo, J. (2020). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis. Proses Kebijakan Publik*. Bayu Media Publishing.
- Winarno, B. (2022). *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo.